

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan yakni bahwa :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi belum optimal walaupun sudah disahkan dan berjalan selama 14 Tahun namun pada praktiknya angka penularan HIV/AIDS di Kota Bekasi masih terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

1. Standar dan tujuan Peraturan Daerah tersebut masih belum mencakup kebutuhan masyarakat luas karena isinya kurang memuat terperinci tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu, ada beberapa hal dari peraturan daerah ini yang menjadi catatan yaitu terkait pengimplementasiannya. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi cukup sering disosialisasikan pada masyarakat namun hanya saja masih belum optimal dalam proses sosialisasinya. Sehingga masih banyak saja masyarakat yang belum mengetahui bahwa sebenarnya ada peraturan yang memuat tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Seluruh pelaksana sudah memahami terkait dengan standar dan tujuan Peraturan Daerah ini dan yang menjadi catatan yaitu peningkatan disintegritas antar stakeholder terkait agar supaya implementasi Peraturan Daerah ini berjalan dengan optimal. Ada beberapa stakeholder yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kota Bekasi diantara yaitu KPA (Komisi Penanggulangan HIV/AIDS, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dan Yayasan Gaya Patriot Bekasi.

2. Sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kota Bekasi ini masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan karena jumlah anggaran dan juga SDM yang ada tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus yang ada. Kemudian keterbatasan jumlah SDM yang ada pada stakeholder yang terlibat seperti organisasi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil gencar melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM nya. Komunikasi yang terbangun dalam lingkup internal dan eksternal para stakeholder yang terlibat cukup berjalan dengan baik. Namun, pemerintah daerah ini sendiri masih dirasa kurang dalam hal merangkul organisasi masyarakat sipil proses perencanaan dan analisis trend kasus juga dalam menganalisis kasus. Koordinasi dan kerjasama lebih banyak dijalin dari pihak organisasi masyarakat sipil kepada pemerintah dibandingkan dengan sebaliknya.
3. Karakter organisasi para pelaksana sudah terlihat cukup baik, hal ini sebab adanya *support* dukungan dari berbagai pihak yang mendukung sepenuhnya program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi. Para pelaksana juga sudah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para ODHA (Orang dengan AIDS) seperti layanan obat ARV yang sudah di rasakan oleh para pengidap HIV dan AIDS.
4. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Pemerintah Kota Bekasi harus menjalin dan menjaga komunikasi yang baik dalam menjalankan peraturan daerah ini baik komunikasi antara organisasi pelaksana ataupun dengan masyarakatnya. Pemerintah juga harus memanfaatkan sarana komunikasi yang ada seperti media online, website ataupun media sosial lainnya karena di era globalisasi sekarang yang semakin modern.
5. Sikap dan juga dukungan para pelaksana kebijakan di lapangan memiliki komitmen tinggi terhadap Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 tentang pencegahan dan penanggulangan

HIV/AIDS di Kota Bekasi sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, juga fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga ikut memberikan pengaruh terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi. Seperti pada kondisi ekonomi, rata-rata masyarakat yang menengah kebawah yang memiliki masalah ekonomi lebih rentan menjadi actor pekerja seksual. Selain itu banyak juga masyarakat ekonomi kebawah yang kesulitan mengakses informasi sehingga mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada kebijakan yang memuat tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Kemudian Faktor sosial ikut memberikan pengaruh terutama terhadap perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada sosial budaya yang ada, mudahnya akses kegiatan *Open Booking* yang dilakukan melalui media sosial tentu sangat menghambat proses penanggulangan dikarenakan banyak terjadi penyebaran kasus HIV baru yang ditularkan melalui kegiatan *Open Booking* yang dilakukan melalui Media Sosial ataupun aplikasi sosial. Selanjutnya faktor politik yang berhubungan dengan kebijakan dan penguasa, dalam hal ini pemerintah daerah belum dirasa sepenuhnya mengoptimalkan peraturan daerah yang ada dikarenakan masih adanya kesenjangan pada masyarakat menengah kebawah. Selain itu para SDM yang ada juga harus ditingkatkan lagi kinerjanya agar lebih optimal.

Salah satu penyebab suatu kebijakan tidak bisa berjalan secara optimal yaitu terdapat hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ini terdapat 6 hambatan diantaranya yaitu pertama Kurangnya Koordinasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Layanan dengan Organisasi Masyarakat Sipil, kedua keterbatasan anggaran, ketiga Belum maksimalnya upaya Organisasi Pemerintah Daerah dalam hal pencegahan dan penanggulangan Kasus HIV, ke empat Kurangnya pemahaman masyarakat, ke lima Pengidap HIV dengan tingkat kepedulian

yang rendah, ke enam Perkembangan teknologi dan informasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka dilakukan beberapa upaya seperti Kerjasama lanjutan dan kolaborasi semua pihak (pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan universitas) ddalam penanggulangan kasus kekerasan seksual. Selanjutnya diadakannya sosialisasi melalui online guna menekan anggaran. Organisasi masyarakat sipil juga terus melakukan pengawasan terhadap organisasi pemerintah daerah agar lebih optimal menjalankan kinerjanya. Kegiatan sosialisasi juga gencar dilakukan demi meningkatkan pemahaman masyarakat dan himbauan pada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam hal pemanfaaatn media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi teoritis yang didapatkan dalam menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter and Varn Horn yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh standar dan tujuan dari isi kebijakan yang ada. Standar dan tujuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi belum sepenuhnya mencakup kebutuhan masyarakat luas sehingga implementasinya menjadi tidak maksimal sebab karena tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas yang ada. Selain itu juga pemahaman dari para pelaksana terhadap standar dan tujuan juga merupakan hal yang penting. Para pelaksana kebijakan sudah memahami terkait standar dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut. Kemudian Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan sumber daya, dalam hal ini sumber daya yang ada ikut serta berkontribusi dalam hal pengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah yang ada karena keterbatasan sumber daya yang ada turut menjadi faktor hambatan seperti pada keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang terjadi. Selanjutnya Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi

kebijakan dengan karakteristik Organisasi Pelaksana dimana setiap stakeholder yang terlibat memiliki perannya masing-masing dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual.

Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan dimana komunikasi antar stakeholder yang terlibat sudah terjalin dengan cukup baik. Namun, upaya sosialisasi pada masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga masih ditemukannya masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa terdapat kebijakan yang memuat tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Lalu kemudian juga Van Metter and Varn Horn menghubungkan implementasi kebijakan dengan sikap para pelaksana, belum optimalnya peraturan daerah yang ada juga disebabkan oleh dukungan dari pemerintah daerah yang masih kurang dalam mengimpelentasikan peraturan tersebut. Selanjutnya Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dimana faktor eksternal ini turut memberikan pengaruh terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, seperti pada kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah yang terpaksa menjadi pekerja seksual, dan melakukan kegiatan *Open Booking* secara terbuka di media sosial yang dapat berpeluang menjadi penyebar virus HIV/AIDS, dan kemudian sulitnya akses informasi dari masyarakat menengah kebawah. kondisi sosial budaya terutama perkembangan teknologi dan informasi turut menjadi penghambat karena mudahnya akses melakukan kegiatan *Open Booking* secara terbuka menyebabkan risiko yang sangat tinggi dalam hal penyebaran HIV/AIDS ini. Selanjutnya kondisi politik dimana berhubungan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal ini pemerintah dirasa belum optimal menjalankan kebijakan yang ada selain itu kebijakan yang ada juga belum sepenuhnya memuat secara mendetail tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Selain itu keterkaitan tokoh agama di dalam hal pencegahan dan penanggulanagn HIV/AIDS ini sangat diperlukan dan dilibatkan guna untuk

memberikan siraman rohani maupun kajian kepada orang-orang yang rentan berisiko didalam menularkan HIV/AIDS , guna untuk membentuk hatinya agar tidak melakukan pengulangan yang salah sebagaimana visi Kota Bekasi yakni Bekasi Ihsan yang dimana Bekasi Ihsan ini menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu keluarga dan masyarakat kota Bekasi. Kedisiplinan keterlibatan sosial keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi belum berjalan secara optimal. Berikut ini ada beberapa saran yang peneliti berikan untuk arah perkembangan selanjutnya :

1. Harus dibentuknya produk hukum yang lebih mengatur secara mendetail terkait upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS agar kasus penyebaran tidak semakin luas. Sedikit apapun orang yang sudah terinfeksi HIV perlu ditangani secara serius guna mencegah kasus penyebaran yang semakin serius dan dapat diminimalisir kedepannya. Selain itu pemerintah daerah juga harus lebih merangkul seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS seperti organisasi masyarakat sipil agar terbentuk disintegritas antara semua stakeholder dan upaya yang dilakukan semakin optimal.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih maksimal lagi dalam upaya menjalankan implementasi peraturan daerah yang ada terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pemerintah harus lebih bijak menganalisis kebutuhan masyarakat dan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menjadi pelopor dan pelapor. Pemerintah juga dapat melakukan asesmen pada

masyarakat terkait tingginya kasus yang ada agar dapat menganalisis apa faktor penyebab tingginya kasus HIV/AIDS yang terjadi di Kota Bekasi ini. Hal ini bertujuan agar kedepannya dapat ditemukan solusi yang lebih tepat untuk upaya penanggulangan kasus.

3. Dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang hanya berjumlah 5 orang yang bekerja di lingkup KPA Kota Bekasi di harapkan menambah Dan meningkatkan sumber daya manusia agar semua kegiatan yang dilakukan KPA kota Bekasi dapat dilakukan dengan optimal.
4. Masalah mengenai tenaga, dana , sarana dan prasarana yang masih belum cukup baik , ini perlu dibicarakan dengan walikota Bekasi selaku ketua dari komisi penanggulangan AIDS Kota Bekasi.
5. Melakukan dengar pendapat atau audiensi terkait dengan penganggaran kepada pihak legislative mengenai masalah dukungan dana APBD.
6. Melakukan pengembangan penyebar luasan informasi menggunakan media yang kreatif seperti pembuatan video reels ataupun video film singkat.
7. Agen pelaksana harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyakit HIV dan AIDS agar tidak terjadinya diskriminasi yang mempengaruhi kualitas hidup ODHA.
8. Penyampaian pesan harus jelas agar mengenai sasaran kebijakan serta koordinasi antara semua pihak terkait (stakeholder) yang bertanggung jawab harus terjalin dengan baik.
9. Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu diadakan secara berfokus pada kelompok yang sangat rentan terhadap risiko penularan HIV dan AIDS seperti kelompok WPS dan juga LSL.
10. Perlu adanya keterlibatan peran tokoh agama yang aktif di dalam hal pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi.
11. Melakukan kajian bulanan dengan mengundang tokoh agama sekitar untuk memberikan penyampaian-penyampaian dengan maksud memberikan pandangan kajian rohani kepada para populasi kunci.

